



PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN DAN ETIKA TERHADAP KESENJANGAN ANGGARAN

Rijal Badar

Fakultas Ekonomi Universitas Nuku

(Naskah diterima: 20 November 2021, disetujui: 28 Desember 2021)

Abstract

The purpose of the study was to examine the effect of budgetary participation and ethics on budgetary gaps in the Regional Apparatus Organization (OPD) of the Tidore Islands City Government. Sample selection by purposive sampling method. The data used in this study are primary data with data collection techniques by distributing questionnaires to each Head of Division/Section and Head of Finance Subdivision in each OPD. The results of the questionnaire were processed using IBM SPSS Statistics. The results show that budget participation has a positive effect on budgetary slack and ethics has a role in influencing budgetary participation on budgetary slack.

Keywords: budgetary slack, budget participation, and ethics

Abstrak

Tujuan penelitian untuk menguji pengaruh partisipasi anggaran dan etika terhadap kesenjangan anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Pemilihan sampel dengan metode purposive sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dengan teknik pengumpulan data dengan menyebarluaskan kuesioner kepada masing-masing Kepala Bidang/Seksi dan Kepala Subbagian Keuangan pada setiap OPD. Hasil kuesioner diolah menggunakan IBM SPSS Statistic. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap senjangan anggaran dan etika mempunyai peran dalam pengaruh partisipasi anggaran terhadap kesenjangan anggaran.

Kata kunci : senjangan anggaran, partisipasi anggaran, dan etika

I. PENDAHULUAN

Organisasi publik memiliki peranan penting dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Untuk mewujudkannya, diperlukan pengendalian agar sumber daya yang ada dapat

digunakan sebagaimana mestinya. Salah satunya adalah melalui anggaran. Menurut Mardiasmo (2009) anggaran pada sektor publik digunakan sebagai instrumen akuntabilitas atas pengelolaan publik dan program-program yang dijalankan pemerintah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah. Implikasi dari kedua undang-undang tersebut adalah pembaharuan sistem keuangan berupa pengelolaan uang rakyat (public money) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang dilakukan secara transparan, efektif, efisien, terarah, terencana, terpadu dan bertanggung jawab. Dengan demikian tujuan dari otonomi daerah dapat tercapai yaitu terciptanya akuntabilitas publik dan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam pelaksanaannya, pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2007 sebagai pedoman dalam melaksanakan, penatausahaan APBD dan laporan keuangan termasuk didalamnya kebijakan akuntansi.

Berdasarkan hasil rapat paripurna ke- 7 masa persidangan I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan pada penyampaian nota keuangan dan Rancangan Angga-

ran Pendapatan Belanja Daerah(RAPBD) Tahun 2021 penyampaian, belanja daerah dianggarkan sebesar Rp. 917.435.501.000 yang terdiri dari Belanja Operasional yang meliputi belanja pegawai, belanja barang jasa dan jasa hibah dan bantuan sosial, dianggarkan sebesar Rp.605.261.365.078.000, Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp. 192.359.337.000, Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp. 15.000.000.000 dan belanja transfer yang meliputi tansfer bantuan keuangan ke desa dianggarkan sebesar Rp. 104.814.799.700.

Contoh kasus senjangan anggaran terindikasi terjadi pada pemerintahan Kota Tidore Kepulauan pada tahun 2017. melakukan peninjauan terhadap anggaran pemerintah Hasilnya menunjukkan bahwa ada beberapa indikasi atas senjangan anggaran pada pemerintah Kota Tidore yaitu pembiaran atas piutang pajak hiburan (TUGULUFA) Kota Tidore dan buruknya pengelolaan retribusi parker Realisasi dari pendapatan pajak pada tahun 2016. Sehingga secara tidak langsung pemerintah Kota Tidore kepulauan telah mengalami kebocoran anggaran di sektor penerimaan pajak hiburan dan kehilangan potensi pendapatan atas pajak hiburan. Selain itu dengan melihat fenomena tersebut adanya senjangan anggaran menyebabkan pendapatan daerah yang seharus-

nya digunakan untuk pembangunan daerah menjadi tersendat akibat perilaku pemerintah daerahnya. Berdasarkan teori agensi (agency theory) penentuan target pendapatan dalam penyusunan anggaran mempunyai kecenderungan akan dianggarkan lebih rendah dari kemampuan maksimal yang seharusnya bisa dicapai. Hal ini dilakukan agar target anggaran akan mudah dicapai yang terlihat pada pencapaian realisasi anggaran yang cenderung lebih besar dari targetnya. Berbeda dengan pendapatan, belanja memiliki kecenderungan dianggarkan lebih tinggi dari yang seharusnya. Sehingga realisasi belanja akan lebih rendah dari anggaran. Kecenderungan ini merupakan indikasi terjadinya senjangan anggaran (Irfan, Santoso, & Effendi, 2016). Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, adanya indikasi terjadinya senjangan anggaran bisa dilihat dari laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) yang berupa laporan realisasi anggaran (LRA) pada masing-masing SKPD melalui website pemerintah Kota Tidore Kepulauan Sebagai contoh beberapa LRA dari SKPD yang laporannya dipublikasikan melalui website mengindikasikan tejadinya senjangan anggaran.

II. KAJIAN TEORI

2.1.1 Partisipasi Anggaran

Partisipasi anggaran adalah suatu pernyataan formal yang dibuat oleh manajemen tentang rencana-rencana yang akan dilakukan pada masa yang akan datang dalam suatu periode tertentu. Rencana tersebut akan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan selama periode tersebut. Menurut Cherrington dan Cherrington (1973) dalam Supomo dan Indriantoro (1998), anggaran adalah alat utama bisnis untuk menggambarkan suatu rencana, untuk mengkoordinasikan dan mengimplementasikan rencana tersebut, mengevaluasi usaha yang dilakukan terhadap pencapaian hasil, dan untuk mengendalikan aktivitas didalam organisasi. Garrison dan Noreen (2000) mendefinisikan anggaran adalah rencana rinci tentang perolehan dan penggunaan sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya untuk suatu periode tertentu. Schiff and Lewin (1970) menyatakan anggaran merupakan rencana keuangan perusahaan yang digunakan sebagai pedoman untuk menilai kinerja individual. Partisipasi anggaran yaitu tingkat keterlibatan dan pengaruh para individu dalam proses penyusunan anggaran (Brownell, 1982). Milani (1975) menyatakan bahwa partisipasi dalam penyusunan anggaran

berkaitan dengan seberapa jauh keterlibatan manajer didalam menentukan atau menyusun anggaran yang ada dalam departemen atau bagianya, baik secara periodik maupun tahunan. Menurut Brownell (1982) partisipasi dalam penyusunan anggaran merupakan proses dimana para individu, yang kinerjanya dievaluasi dan memperoleh penghargaan berdasarkan pencapaian target anggaran, terlibat dan mempunyai pengaruh dalam penyusunan target anggaran. Garrison dan Noreen (2000) mendefinisikan partisipasi anggaran adalah anggaran yang dibuat dengan kerjasama dan partisipasi penuh dari manajer pada semua tingkatan. Anggaran yang disusun secara partisipatif lebih mencerminkan bahwa keputusan-keputusan yang penting dalam proses penyusunan anggaran dibuat secara kelompok dari pada dibuat secara individual (Supomo dan Indriantoro, 1998). Oleh sebab itu anggaran partisipatif lebih memungkinkan bagi para manajer (sebagai bawahan) untuk melakukan negosiasi dengan atasan mereka mengenai kemungkinan target anggaran yang dapat dicapai.

2.1.2 Etika

Etika merupakan suatu sikap yang harus dimiliki oleh orang-orang yang bekerja dalam pemerintahan untuk menjalankan kebijakan

publik agar terciptanya pemerintahan yang baik. Etika sektor publik dalam melayani masyarakat harus memiliki pedoman, referensi, petunjuk tentang apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam menjalankan kebijakan publik. Etika dapat digunakan sebagai standar dalam penilaian apakah perilaku oknum pemerintahan dalam menjalankan kebijakan publik dapat dikatakan baik atau buruk (Priyetno, 2018). Dapat disimpulkan secara singkat bahwa etika pemerintahan diadakan untuk membuat pemerintahan yang sudah ada untuk menjadi lebih baik. Dengan adanya etika pemerintahan di setiap pimpinan dari pemerintahan maupun staffnya akan muncul rasa hormat terhadap hidup manusia atau masyarakat dan HAM yang dimiliki oleh masyarakat. Kemudian pemerintah diharapkan memiliki kejujuran yang dimana hal ini akan memunculkan rasa saling percaya antara masyarakat dan juga pemerintah untuk saling bergantung satu sama lain, dan kemudian dapat menciptakan kesejahteraan yang diinginkan.

2.1.3 Kesenjangan Anggaran

Menurut Young (1985) dalam Sahputra Dkk, (2018) senjangan anggaran merupakan tindakan bawahan yang mengecilkan kapabilitas produktifnya saat diberikan kesempatan

untuk menentukan standar kerjanya. Kesenjangan terjadi karena adanya perbedaan antara potensi dan kebutuhan daerah dengan target anggaran pendapatan maupun belanja yang dianggarkan. Indikasi terjadinya senjangan anggaran adalah adanya perilaku merendahkan target pendapatan dan meninggikan anggaran belanja untuk memudahkan pencapaian anggaran pemerintah daerah. Hal ini disebabkan oleh adanya perilaku individu untuk mengupayakan menyusun anggaran yang dirasa lebih mudah untuk dapat dicapai, serta aman terhadap pertanggungjawaban anggaran.

Sementara menurut Dunk (2000) dalam Sinaga (2013) terdapat tiga indikator dalam senjangan anggaran yaitu:

1. Perbedaan antara jumlah anggaran dengan estimasi terbaik.
2. Target atau sasaran anggaran.
3. Kondisi lingkungan

Senjangan anggaran dapat berdampak buruk pada organisasi sektor publik. Unit pertanggungjawaban dengan senjangan anggaran yang tinggi akan menerima sumber daya lebih banyak dari yang seharusnya yang akan mempengaruhi unit pertanggungjawaban lain. Alokasi yang kurang optimal ini dapat menurunkan efisiensi perusahaan, Priyetno. (2018).

III. METODE PENELITIAN

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu teknik sampling yaitu:

Kuesioner

Tujuan kuesioner adalah memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan survey memperoleh informasi dengan tingkat keandalan dan keabsahan setinggi mungkin. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dilakukan sendiri oleh responden tanpa dibantu dari pihak peneliti serta pertanyaan yang diajukan dari responden harus jelas.

Observasi

(Sugiono 2012:145) adalah teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan responden yang diamati tidak terlalu besar. Proses observasi ini peneliti dapat mengamati situasi-situasi yang ada dilapangan dengan mencatat apa-apa yang dianggap penting guna menunjang terhadap tujuan penelitian. Observasi ini memberikan kemudahan terutama dalam hal memperoleh data dilapangan.

Metode Dan Analisis Data

Agar suatu data yang dikumpulkan dapat bermanfaat maka harus diolah melalui Program SPSS 20 dan dianalisis terlebih dahulu sehingga dapat dijadikan dasar pengambilan

keputusan tujuan metode analisis ini adalah sebagai berikut:

Analisa Kuantitatif

Dengan melakukan penyebaran kuesioner untuk mengukur persepsi responden digunakan skala liter (Rangkuti. 1997) pertanyaan dalam kuesioner dibuat dengan menggunakan skala 1-5 untuk mewakili pendapat dari responden nilai untuk skala tersebut adalah;

- 1) Sangat Sesuai (SS) = 5
- 2) Sesuai (S) = 4
- 3) Netral (N) = 3
- 4) Tidak Sesuai (TS) = 2
- 5) Sangat Tidak Sesuai (STS) = 1

Analisis Regresi Linier berganda

Analisis regresi linear berganda adalah analisis untuk mengukur besarnya pengaruh antara dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen dan memprediksi variabel dependen dengan menggunakan variabel dependen. Rumus yang nantinya mengukur dua variabel Independen dan satu variabel Dependend adalah sebagai berikut:

Y : Kesenjangan Anggaran

$X1$: Partisipasi Anggaran

$X2$: Etika

Uji t

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen dan variabel dependen. Test Hipotesis Koefisien Korelasi.

Uji F

Uji F adalah proses pengujian secara simultan antara variabel Partisipasi Anggaran X1 dan Etika X2 terhadap Kesenjangan Anggaran pada OPD Kota Tidore Kepulauan.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis ini adalah mengukur besarnya pengaruh antara dua variabel Independen dan satu variabel Dependend dalam hal ini Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Etika Terhadap Kesenjangan Anggaran pada OPD Kota Tidore Kepulauan.

Output ini menjelaskan tentang variabel yang di maksutkan dalam model dan yang di keluarkan dari model. dari output dapat dilihat bahwa variabel independen yang di masukkan dalam model adalah Partisipasi Anggaran (X1) dan Etika (X2) tidak ada variabel yang di keluarkan (Removed) sedangkan metode regresi menggunakan enter. Sedangkan tabel model Summary dapat di perhatikan pada tabel 4.11 dibawah ini:

Tabel 4.11**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,780 ^a	,608	,589	1,65619

a. Predictors: (Constant), ETIKA, PARTISIPASI ANGGARAN

Sumber pengelolaan SPSS 20,0

Berdasarkan tabel 4.11 di atas, menjelaskan ringkasan model yang terdiri dari hasil nilai korelasi berganda (R), kovisien determinasi (R Square), kovisien determinasi yang disesuaikan (Adjusted R Square) dan ukuran kesalahan preiksi (std Error of estimate). R dalam regresi linier berganda menunjukkan ni-

lai korelasi berganda, yaitu korelasi antara dua atau lebih variable independen terhadap variable dependen artinya bahwa partisipasi anggaran dan etika simultan berpengaruh terhadap kesenjangan anggaran. Nilai R berkisar antara 0 sampai 1, jika mendekati maka hubungan semakin erat tetapi jika mendekati 0 maka hubungan semakin lemah. Angka R yang didapat 0.780 artinya korelasi antara partisipasi anggaran dan etika terhadap senjangan anggaran bernilai sebesar 0.780 hal ini berarti terjadi hubungan sangat erat karena nilai mendekati 1.

Tabel 4.9**Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Beta	T	Sig.
	B	Std. Error			
1	(Constant)	6,519	2,217	2,940	,005
	PARTISIPASI	,564	,161		
	ANGGARAN	,208	,133		
1	ETIKA		,564	3,494	,001
			,253	1,567	,004

a. Dependent Variable: KESENJANGAN ANGGARAN

Sumber pengelolaan SPSS 20,0

Uji t (Unji Secara Parsial)

1. Hasil penujian Hipotesis Pertama (H1)

Dari table 4.9 hasil statistic uji T untuk variable partisipasi anggaran diperoleh nilai t-hitung sebesar 3.494 dengan nilai signifikansi 0.001 lebih kecil dari 0.05 ($0.001 < 0.05$), dan covisien regresi mempunyai nilai positif

sebesar 0.564 dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima. Hal ini karena partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap kesenjangan anggaran.

2. Hasil pengujian hipotesis kedua (H2)

Dari table 4.9 hasil statistic uji T untuk variable etika diperoleh nilai t-hitung sebesar 1.567 dengan nilai signifikansi 0.004 lebih kecil dari 0.05 ($0.004 < 0.05$), dan covisien regresi mempunyai nilai positif sebesar 0.208 dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua diterima. Hal ini karena etika berpengaruh positif terhadap kesenjangan anggaran.

Uji F (uji secara simultan)

Uji F adalah uji koefisien regresi bersama-sama di gunakan untuk mengetahui apakah secara bersama-sama variabel Independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dalam hal ini apakah partisipasi anggaran dan etika secara simultan berpengaruh terhadap kesenjangan anggaran BPKD Kota Tidore Kepulauan atau tidak. Dengan tingkat signifikansinya 0,05. Langkah-langkah uji F adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	170,328	2	85,164	31,048	,000 ^b
Residual	109,718	40	2,743		
Total	280,047	42			

a. Dependent Variable: KESENJANGAN ANGGARAN

b. Predictors: (Constant), ETIKA, PARTISIPASI ANGGARAN

Sumber pengelolaan SPSS 20,0

Uji F (uji secara simultan)

Output ini menjelaskan hasil uji F atau uji koefisien regresi. Dari hasil pengujian pada tabel 4.10 di atas dapat diketahui bahwa nilai F hitung $>$ F tabel ($31.048 > 3.180$) maka H_0 ditolak jadi dapat diartikan bahwa pengaruh partisipasi anggaran dan etika berpengaruh secara simultan terhadap senjangan anggaran sedangkan berdasarkan tingkat signifikansi, dari hasil pengujian pada tabel 4.10 di atas jika signifikansinya $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan jika signifikansi $> 0,05$ maka H_0 di terima, karena nilai signifikansi yang didapat adalah $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak artinya bahwa pengaruh partisipasi anggaran dan etika berpengaruh secara simultan terhadap senjangan anggaran.

IV. HASIL PENELITIAN

PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN DAN ETIKA TERHADAP KESENJANGAN ANGGARAN

1. H_1 : Partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap senjangan anggaran. Berdasarkan uji hipotesis, variabel partisipasi anggaran memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi tersebut kurang dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) sehingga dapat dikatakan bahwa partisi-

pasi anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap senjangan anggaran.

Koefisien β untuk variabel partisipasi anggaran memiliki nilai positif yaitu sebesar 0,539. Hasil tersebut mendukung H1 bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap senjangan anggaran, sehingga H1 dapat diterima. Hal ini memiliki arti bahwa jika tingkat partisipasi dalam penyusunan anggaran meningkat, maka akan menyebabkan peningkatan senjangan anggaran. Dari hasil pengujian tersebut, maka pada OPD Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dapat diketahui bahwa adanya partisipasi anggaran dapat meningkatkan terjadinya senjangan anggaran. Dalam hal ini, OPD selaku agen yang ikut berpartisipasi dalam menyusun anggaran memiliki kecenderungan untuk melakukan senjangan dengan mengusulkan anggaran yang lebih mudah untuk dicapai agar kinerjanya dinilai baik. Agen yang diberikan kesempatan untuk terlibat dalam penyusunan anggaran ter dorong untuk melakukan perilaku disfungsional yaitu dengan meninggikan beban dan menurunkan pendapatan yang tidak sesuai dengan kemampuan sesungguhnya.

Berdasar pada teori agensi, senjangan anggaran dapat terjadi karena antara prinsipal dan agen terjadi asimetri informasi. Hal ini

timbul karena agen yang ikut berpartisipasi dalam penyusunan anggaran memberikan informasi yang bias kepada prinsipal, sementara agen memiliki informasi yang dapat digunakan untuk membantu agar anggaran organisasi lebih akurat. Sehingga partisipasi agen dalam proses penyusunan anggaran akan membuat agen melakukan tindakan yang ingin dicapai demi kepentingan sendiri yaitu dengan menciptakan senjangan anggaran. Sementara itu tujuan partisipasi anggaran pada sektor publik khususnya pemerintah daerah yang seharusnya adalah dapat meningkatkan motivasi dan tanggungjawab dari para manajer dan staf khususnya yang menyusun dan melaksanakan anggaran terhadap pencapaian target anggaran. Akan tetapi berdasarkan penelitian pada SKPD Kota Tidore Kepulauan, adanya partisipasi anggaran justru akan meningkatkan kecenderungan terjadinya senjangan anggaran. Hal ini mendukung hasil penelitian dari Irfan, Santoso, & Effendi (2016), Sihombing dan Rohman (2017), Kartika (2010) yang menyatakan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap senjangan anggaran. Dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi anggaran maka akan semakin meningkat pula senjangan anggaran yang dilakukan.

2. H2: Etika mempunyai peran dalam pengaruh partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran Berdasarkan uji hipotesis, interaksi antara variabel partisipasi anggaran dengan etika memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,974. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi tersebut lebih dari 0,05 ($0,974 > 0,05$) sehingga dapat dikatakan bahwa etika tidak berpengaruh antara partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran. Karna Koefisien β untuk variabel etika memiliki nilai negatif yaitu sebesar -0,004 tetapi tidak mendukung H3 bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap senjangan anggaran dimana pengaruh tersebut akan semakin lemah dengan adanya etika karena nilainya tidak signifikan sehingga H3 ditolak. Hal ini memiliki arti bahwa dalam partisipasi anggaran adanya etika tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan senjangan anggaran. Hal ini dimungkinkan karena adanya etika yang sudah baik dalam lingkungan kerja pada masing-masing OPD seperti para pegawai yang bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku dan memiliki disiplin kerja yang baik. Namun hal tersebut tidak menjadi faktor yang dapat menurunkan kemungkinan terjadinya senjangan anggaran dalam partisipasi anggaran. Selain itu, dimungkinkan

bahwa pada OPD Kota Tidore Kepulauan terjadinya senjangan anggaran bukan disebabkan karena faktor individual seperti etika. Hal ini mendukung penelitian dari Hariningtyas (2014) dan Priyetno (2018) yang menyatakan bahwa partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran tidak dapat dimoderasi oleh pertimbangan etika.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian berupa kuesioner dan hipotesis yang diajukan, maka kesimpulan dari hasil penelitian “Pengaruh Partisipasi Anggaran, dan Etika terhadap kesenjangan anggaran” pada Pemerintah Kota Tidore Kepulauan” adalah sebagai berikut :

1. Partisipasi anggaran berpengaruh positif secara signifikan terhadap senjangan anggaran pada OPD Pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi anggaran, maka akan semakin besar pula kemungkinan terjadinya senjangan anggaran.
2. Etika tidak berpengaruh secara signifikan atau tidak dapat memoderasi dalam hubungan antara partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran pada OPD Pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Hal ini berarti bahwa variabel etika tidak dapat memode-

rasi hubungan antara partisipasi anggaran dengan senjangan anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

Adrianto, E. (2013). Pengaruh Persepsi Keadilan Prosedur, Efektivitas Pengendalian Anggaran, dan Iklim Kerja Etis Terhadap Kecenderungan Melakukan Budgetary Slack pada Organisasi Publik.

Anggraeni, A. (2016). Pengaruh Partisipasi Anggaran pada Budgetary Slack dengan Asimetri Informasi, Self Esteem, Locus of Control, dan Kapasitas Individu Sebagai Variabel Moderasi (Studi pada SKPD Kabupaten Jembrana, Bali). *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 4, 296-311.

Anthony, R.N., & Govindarajan, V. (2007). *Management Control System*. Mc Graw Hill (12th ed.).

Ardianti. (2015). Pengaruh Asimetri Informasi Terhadap Senjangan Anggaran pada Penganggaran Partisipatif dengan Orientasi Etika Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Nominal*, IV, 73-87.

Ardila, Lisa. (2013). Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran dengan Ambiguitas Peran dan Asimetri Informasi Sebagai Pemoderasi.

Asih, N. P. Y., Astika, I. B. P., & Putri, L. G. . M. A. D. (2016). Pengaruh Partisipasi Penganggaran Terhadap Budgetary Slack dengan Etika, Budaya Organisasi, Opportunistic Behaviour dan Ketidakpastian Lingkungan Sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 12, 4415– 4442.

Badan Pekerja Malang Corruption Watch. (2017). Laporan Akhir Tahun 2017 Malang Corruption Watch. Diakses dari <https://mcw-malang.org/wp-content/uploads/2018/01/Laporan-Aakhir-Tahun-MCW-2017.pdf> pada tanggal 20 September 2018.

Biantara, A. A. A., & Putri, I. A. M. A. D. (2014). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Etika, dan Kepercayaan Diri Pada Senjangan Anggaran. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 9(2), 385–391.

Christina. (2009). Pengaruh Partisipasi Anggaran, terhadap Senjangan Anggaran dengan Ketidakpastian Lingkungan sebagai Variabel Moderating pada PT. Perusahaan Gas Negara (PERSERO) Tbk, Jawa Bagian Barat.

Dunk, A.S. (1993). The Effect of Budget Emphasis and Information Asymmetry on the Relation between Budgetary Participation and Slack. *The Accounting Review*, 68(2), 400-410.

Falikhatun. (2007). Interaksi Informasi Asimetri, Budaya Organisasi, dan Group Cohesiveness dalam Hubungan Antara Partisipasi Penganggaran dan Budgetary Slack. *Simposium Nasional Akuntansi X*.

Ferawati, D. (2015). Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran (Budgetary Slack) dengan Asimetri Informasi, Gaya Kepemimpinan dan Komitmen

Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir). *Jom FEKON*, 2(2), 1–15.

Fibri W., Lidwina Imelda. (2009). Pengaruh Reputasi, Etika, dan Job Satisfaction terhadap Budgetary Slack di bawah Asimetri Informasi sebagai Variabel Moderating.

Asih, N. P. Y., Astika, I. B. P., & Putri, L. G. . M. A. D. (2016). Pengaruh Partisipasi Penganggaran Terhadap Budgetary Slack dengan Etika, Budaya Organisasi, Opportunistic Behaviour dan Ketidakpastian Lingkungan Sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 12, 4415– 4442.

Ferawati, D. (2015). Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran (Budgetary Slack) dengan Asimetri Informasi, Gaya Kepemimpinan dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir). *Jom FEKON*, 2(2), 1–15.

Fitra, I. (2017). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Komitmen Organisasi Terhadap Budgetary Slack. Skripsi. Padang : Universitas Negeri Padang.

Gunawan, D. (2010). Pengaruh Kejelasan Anggaran dan Partisipasi Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Yogyakarta). Skripsi. Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Hasanah dan Suartana. (2015). Pengaruh Interaksi Motivasi dan Budaya Organisasi pada Hubungan Antara Partisipasi Penyusunan Anggaran dengan Senjangan Anggaran. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*

Hadi, S. (2006). Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Akuntansi dan Keuangan.(1st ed.). Yogyakarta : Ekonesia.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/92807/perwali-kota-tidore-kepulauan-no-12-tahun-201> (diakses pada hari Senin tanggal 2 April t 2021,pukul 00.12 WIT)

<http://infopublik.id/kategori/nusantara/490692/rapbd-tahun-2021-disampaikan-ke-dprd-kota-tidore> (diakses pada hari Senin tanggal 2 April 2021,pukul 00.12 WIT).